



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disusun Oleh :

**APRILIANA SARI**  
11521201360

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN  
LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT  
TAHUN 2017-2018**

**SKRIPSI**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN  
LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT  
TAHUN 2017-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh :

**APRILIANA SARI**  
11521201360

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL ASY – SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1441 H/2020 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul: ***TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018***, yang ditulis oleh:

Nama : **APRILIANA SARI**  
 Nim : 11521201360  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1441 H  
 2020 M

Pembimbing Skripsi

**Dra. Hj. Yusliati, MA**  
**NIP. 19580707 198612 2 001**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Laur Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017 – 2018“, yang ditulis oleh :

Nama : **Apriliana Sari**  
 NIM : 11521201360  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Asy – Syakhsyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020  
 Waktu : 08.00 Wib  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, S.Hi, M.A**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji II  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 196803 1 005

Hasil penelitiannya adalah implikasi terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat adalah pasangan yang belum cukup umur juga termasuk salah satu penyebab timbulnya perselisihan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah adalah yang paling utama tentu saja calon mempelai masih di bawah dan sudah ingin menikah, umur laki-laki dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan dibawah 16 (enam belas) tahun, dan faktor lain yaitu karena luntturnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja menyebabkan terjadinya hubungan di luar nikah sehingga mengalami hamil di luar nikah. Pertimbangan hakim yang digunakan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2), kemudian menimbang berdasarkan hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum dan melihat keadaan darurahnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. shalawat beriring salam tak lupa pula penulis panjatkan teruntuk Nabi Muhammad SAW. beliauah yang telah membawa kita menuju kebaikan hingga saat ini, semoga kita semua termasuk dalam golongan umat beliau dan mendapat syafa'at di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan moral dan materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak dan tulus dari hati yang terdalam kepada :

1. Ayahanda Suprpto S. S dan Ibunda Yunidar yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi serta berusaha memenuhi segala kebutuhan penulis dalam masa perkuliahan hingga selesai.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adik-adikku Nurlaili Syafitri dan Zul Fahmi Eka Saputra yang selalu mendoakan dan memeberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Bapak. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta staf.
4. Bapak. Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Faultas Syari'ah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik dalam proses perkuliahan penulis.
5. Bapak. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak. Drs. Zainal Arifin, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Ibu. Dra. Hj. Yusliati, MA selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Pengadilan Agama Rengat Kelas I B, Kepada Ketua beserta semua staf yang telah menerima penulis melaksanakan penelitian dan memberikan data demi kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Dosen dan Pegawai dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dalam proses perkuliahan penulis.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga B 2015 yang telah bersama selama dibangku perkuliahan.
11. Teruntuk sahabat seperjuangan Nailatul Fadhillah, Uci Murliza, Erwin Ningsih, Diah Miranty, Siti Asiyah, Resti Ayu Rahmadani, Putri Yanti, Putri Rahmatul Huda, Andrisa Alifni, dan Wenti Lusi, yang turut membantu dan memberikan masukan serta sarannya.
12. Dan semua pihak yang ikut membantu yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Penuis menyadari bahwa kekurangan dan kelemahan tak luput dari penulisan skripsi ini, oleh karenanya apabila ada kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aminn.

Pekanbaru, 17 Oktober 2019

APRILIANA SARI  
NIM. 11521201360





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II      GAMBARAN      UMUM      LOKASI      PENELITIAN</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA RENGAT</b>	
A. Sejarah Dan Perkembangan Pengadilan Agama Rengat ....	17
B. Visi Dan Misi .....	20
C. Struktur Organisasi.....	22
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rengat.....	24
E. Uraian Tugas Di Pengadilan Agama.....	24
<b>BAB III      TINJAUAN      TEORITIS      TENTANG      DISPENSASI</b>	
<b>NIKAH</b>	
A. Dispensasi Nikah.....	33
B. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	35
C. Pihak Yang Boleh Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah .....	42

## BAB IV

### TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018

A. Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat.....	44
B. Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat .....	46
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rengat Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah.....	53

## BAB V

### PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

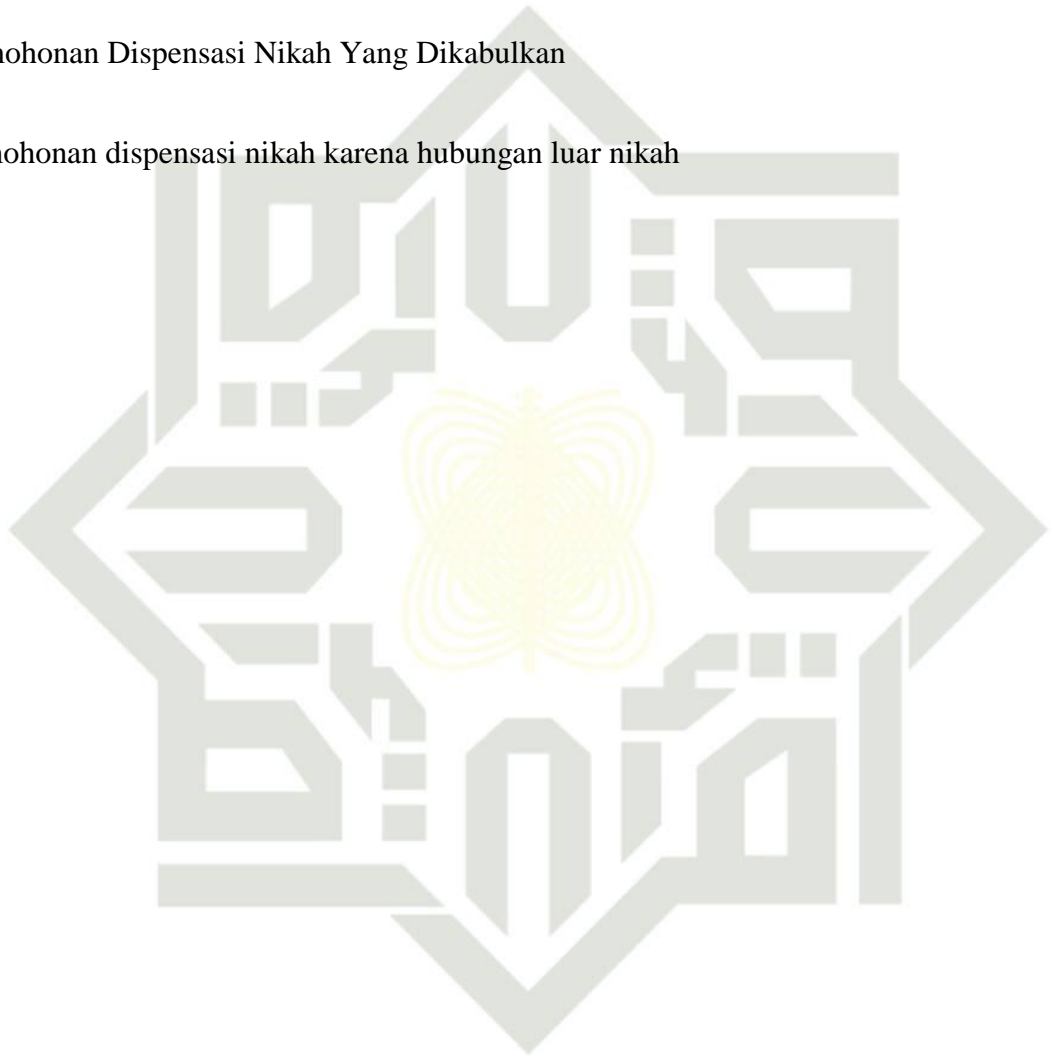
**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Permohonan Dispensasi Kawin Yang Masuk

Tabel 4.2 Alasan Permohonan Dispensasi Nikah

Tabel 4.3 Permohonan Dispensasi Nikah Yang Dikabulkan

Tabel 4.4 permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Surat Izin Riset Dekan
Lampiran II	Surat Izin Riset DPMPTSP/Kesbangpol Provinsi
Lampiran III	Surat Izin Riset DPMPTSP/Kesbangpol Kabupaten/Kota
Lampiran IV	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Dari Lokasi Penelitian

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga yang menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan pernikahan. Ikatan ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Peristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dalam bagian masyarakat yang juga menentukan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu sejak awal adanya manusia sudah ditentukan adanya aturan perkawinan, agar tata kehidupan masyarakat dapat tercapai. Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian dan tujuan perkawinan dalam Pasal 2 dan Pasal 3,

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: New Merah Putih, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbunyi: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering di pergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga arti untuk akad nikah.<sup>3</sup> Secara arti kata, nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), “akad” (عقد), adanya dua kemungkinan ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Quran memiliki dua arti tersebut.<sup>4</sup>

Secara harfiah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).<sup>5</sup>

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah: Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), Cet. Ke-4, hlm. 114

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, hlm. 7

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-3, hlm. 36

<sup>5</sup> Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, hlm. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi yang akan datang. Seperti terdapat dalam Firman Allah SWT surat an-Nahl ayat 72:<sup>6</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:<sup>8</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>9</sup>

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat diperhatikan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian,

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Hadits Shahih*, (Jakarta : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 274

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 406

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara materi maupun mental.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ وَحْجَ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya: "kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami al A'masy dia berkata: "telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah dia berkata: "ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasullulah SAW bersabda kepada kami: "wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu."

Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyatannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seseorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi *akidah* dan *akhlak* Islam. Karena hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional Indonesia. Tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan serta perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Baeirut : Dar al Kitab al 'ilmiyyah, hlm.438

<sup>11</sup> Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum adat kedewasaan seseorang diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani, atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut hukum islam, seperti halnya hukum adat tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Al-Qur'an hanya memberikan isyarat umum tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidak baligh.<sup>13</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Menurut ulama *Hanafiyyah* anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Dan menurut ulama *Imamiyyah* anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Cet. Ke-1 hlm. 51

<sup>13</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 62

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al Ahwal al Syaksiyyah*, Bairut: Dar al 'illmi lil Malayain, tt. H. 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan tersebut telah diatur secara lengkap, salah satunya tentang usia untuk melakukan perkawinan.

Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maksudnya yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena tujuan perkawinan agar dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, kemudian sesuai dengan hak azazi manusia. Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (3) dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (5) dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal 6 ini, atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal 6 ini. Pasal 6 ayat (6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Pasal 7 ayat (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>15</sup>

Dalam bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu larangan.<sup>16</sup> Pernikahan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dispensasi pernikahan adalah pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus.<sup>17</sup> Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: New Merah Putih, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 14-15

<sup>16</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, hlm. 254

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi\\_Pernikahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan) diakses pada tgl 15 Juli 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Rengat berbagai alasan digunakan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut. Seperti calon pasangan suami istri sudah sangat akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan ada yang menjadikan alasan telah melakukan hubungan luar nikah.

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus di mohonkan kepada Pengadilan Agama, permohonan yang telah di daftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan alasan / diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *bachiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk di tetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.

Karena penetapan itu muncul atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).<sup>18</sup>

Pada Pengadilan Agama Rengat banyak calon mempelai yang ingin menikah dan masih dibawah umur, padahal untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan. Banyaknya pasangan dibawah umur yang mendaftarkan rencana menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan penolakan yang disertakan alasan tidak cukup umur, kemudian disarankan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang berwenang. Adapun yang berhak mengajukan permohonan didpensasi nikah adalah orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur.

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah sehingga ada yang putus sekolah dan terpaksa menikah karena telah hamil. Pada kenyataannya banyak permohonan dispensasi nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama Rengat menggunakan alasan bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan luar nikah, kemudian anak pemohon telah hamil, dan ada juga yang menggunakan alasan anak pemohon telah berpacaran selama setahun dan sudah tidak bisa di pisahkan lagi. Permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018 adalah sebanyak 112

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-16, hlm. 214

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus permohonan, 15 kasus tidak dikabulkan 5 diantaranya menggunakan alasan telah hamil di luar nikah, 97 kasus dikabulkan dan permohonan dispensasi nikah yang menggunakan alasan sudah melakukan hubungan di luar nikah 34 kasus permohonan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2017-2018, sehingga hal ini yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk menelaah tentang : **“TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018”**

#### B. Batasan Masalah

Mengingat penjelasan latar belakang masalah masih bersifat umum untuk itu penulis merasa perlu membatasi masalah dengan jelas, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai wilayah penelitian, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi lokasi penelitian, sehingga arah dan tujuan dari penelitian ini dapat terarah dengan baik serta tidak terjadi kesimpang siuran.

Adapun batasan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang dijelaskan dalam penelitian ini hanya melingkupi permasalahan yang berkaitan dengan implikasi penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah, kemudian faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan

---

<sup>19</sup> Syarkasi, Ketua Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Desember

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah yang timbul dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat?
2. Apa faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan diluar nikah.
  - b. Untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat.
  - c. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Manfaat Penulisan

- a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai dispensasi nikah akibat hubungan luar nikah yang di putus oleh Pengadilan Agama Rengat.
- c. Menambah pengetahuan dan dapat di jadikan referensi pembaca mengenai dispensasi nikah akibat hubungan luar nikah.
- d. Mengembangkan ilmu yang penulis dapatkan di UIN SUSKA Riau.

#### E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan ketetapan dalam penulisan, serta berhubungan dengan maslah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum *sosiologis* yaitu penelitian yang berkenaan efektifitas hukum dan pelaksanaan hukum terkait dengan pelaksanaan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat, Kab. Indragiri Hulu.

##### a. Subjek dan Objek Penelitian

- 1) Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pengambilan sebagai sasaran.<sup>20</sup> Adapun subjek penelitian ini Majelis Hakim yang terlibat dalam persidangan serta

<sup>20</sup> Rahma S, *Subjek Penelitian*, <http://rahmayanisembiring.bogspot.com/2012/12/subjek-penelitian.html> diakses pada 15 Juli 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salinan putusan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018.

- 2) Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial.<sup>21</sup> Adapun objek penelitian ini berkaitan dengan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018 sebanyak 34 permohonan.

#### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *sosiologis* yang dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Indragiri Hulu, di Kantor Pengadilan Agama Rengat kelas IB.

#### c. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>22</sup> Dalam hal ini populasi diambil dari salinan putusan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah sebanyak 34 permohonan yang dikabulkan.
- 2) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>23</sup> Penulis mengambil sampel dengan penarikannya secara keseluruhan dengan menggunakan teknik *total sampling*. Populasi yang tersedia 34 (tiga

<sup>21</sup> Forum Sosiologi Kontemporer, *Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya*, <http://sosiologi.com/objek-penelitian> diakses pada 15 Juli 2019.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-14, hlm. 118

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 119

puluh empat) permohonan yang dikabulkan dijadikan sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rencana penelitian.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama dan penetapan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018.
- b. Data skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami data primer.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Majelis Hakim yang terlibat dalam putusan dispensasi nikah tersebut.
- b. Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen salinan berkas penetapan permohonan dispensasi nikah.

## 4. Teknik Analisis

Dari pengelolaan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membahas dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum menjadi khusus.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan teori secara umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## F Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Pengertian merupakan awal untuk kesinambungan bab-bab selanjutnya, karena pada bab ini akan di ketahui pembatasan dan gambaran permasalahan yang ada. Oleh karena itu bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II: GAMBARAN UMUM

Berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Rengat, serjarah berdirinya Pengadilan Agama Rengat, visi dan misi Pengadilan Agama Rengat, struktur dan organisasi Pengadilan Agama Rengat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian dispensasi nikah, alasan dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang dispensasi nikah karena hubungan luar nikah dan implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan diluar nikah, untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor banyaknya permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat, kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah.

### **BAB V: PENUTUP**

Adapun isi dari penutup yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B

#### Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama telah tumbuh dan melembaga di Bumi Nusantara (Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga Peradilan Agama adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum oleh umat Islam.

Pengadilan Agama Rengat didirikan atas dasar PP No. 45 tahun 1957 dan diresmikan pada tahun 1957 dengan pimpinan Ketua Buya Syech Sulaiman Ar Rasuli yang waktu itu beliau Ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah. Beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat buat sementara datangnya Ketua yang definitif.

Beberapa bulan kemudian dalam tahun 1957 datanglah surat pengangkatan Ketua yang baru secara definitif yaitu Bapak H. Yusuf Qodhi. Selama beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat banyak hal yang dialami, yaitu selain masyarakat banyak yang belum mengenal dengan wewenang Pengadilan Agama, masyarakat masih cenderung untuk berurusan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Juga kedudukan Pengadilan Agama Rengat belum seimbang dengan wewenang Pengadilan Negeri pada saat itu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat itu masyarakat belum mengenal secara dekat dengan fungsi atau wewenang Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama Rengat tetap menjalankan tugas dan fungsinya.

Selama beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat ini mengalami masalah berat tentang tempat, dimana kantor tempat bekerja itu ada yang punya. Yang jelas walau telah delapan kali pindah, namun ia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Rumah penduduk yang pernah dijadikan kantor Pengadilan Agama Rengat adalah sebanyak 8 tempat hingga memiliki gedung sendiri yang dibangun tahun 1977.

Memang saat dibentuknya Pengadilan Agama di Riau ini pada umumnya adalah mengalami kesulitan kantor. Oleh masyarakat adanya Pengadilan Agama lebih berarti dibanding kesulitan rumah dimana Pengadilan Agama itu berkantor. Kesulitan kantor dapat diatasi, tetapi kesulitan menyelesaikan masalah lebih berat dan tidak mudah dicapai atau mungkin tidak terselesaikan.

Pengadilan Agama Rengat yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu yang awalnya bergabung dengan Kabupaten Indragiri Hilir namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 terjadi pemekaran yakni Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) yang meliputi wilayah Kecamatan Tempuling, Tembilahan, Kateman, Gunung Anak serka, Mandah, Kuala Inderagiri, Enok, dan Reteh. Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) yang meliputi wilayah Kecamatan Rengat, Siberida, Pasirpenyu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranap, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Kuantan Hilir, Cerenti, dan Sengingi.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kota Taluk Kuantan. Kemudian setelah terpisah dari Kabupaten Indragiri Hulu belum memiliki instansi Pengadilan Agama sehingga penyelesaian sengketa yang beragama Islam masih di handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali dalam sebulan.

Pada tahun 2004 terjadi peralihan yang mana Peradilan Agama yang dulunya di bawah Departemen Agama Republik Indonesia kemudian dialihkan ke Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serah terima tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Agama Said Agil Al-Munawwar (Menteri Agama saat itu), dengan menyerahkan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas IB dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21 Pengadilan Agama IB Menjadi Kelas IA, maka Pengadilan Agama Rengat dinaikkan Kelasnya dari Kelas II Menjadi Kelas IB.

Mahkamah Agung RI menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, maka pada tanggal 22 Oktober 2018 Mahkamah Agung RI meresmikan 85 Pengadilan Agama baru yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satu dari Pengadilan Agama baru tersebut ialah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dengan diresmikan Pengadilan Agama Teluk Kuantan maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat yang dulunya mencakup 2 (dua) Kabupaten sekarang hanya Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>24</sup>

#### B. Visi dan Misi

##### Visi :

Visi Pengadilan Agama Rengat adalah penjabaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut: “Mewujudkan Pengadilan Agama Rengat sebagai Pengadilan Agama Yang Agung.”

##### Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi Pengadilan Agama Rengat secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan profesional aparaturnya dan modernisasi sarana dan prasarana peradilan.

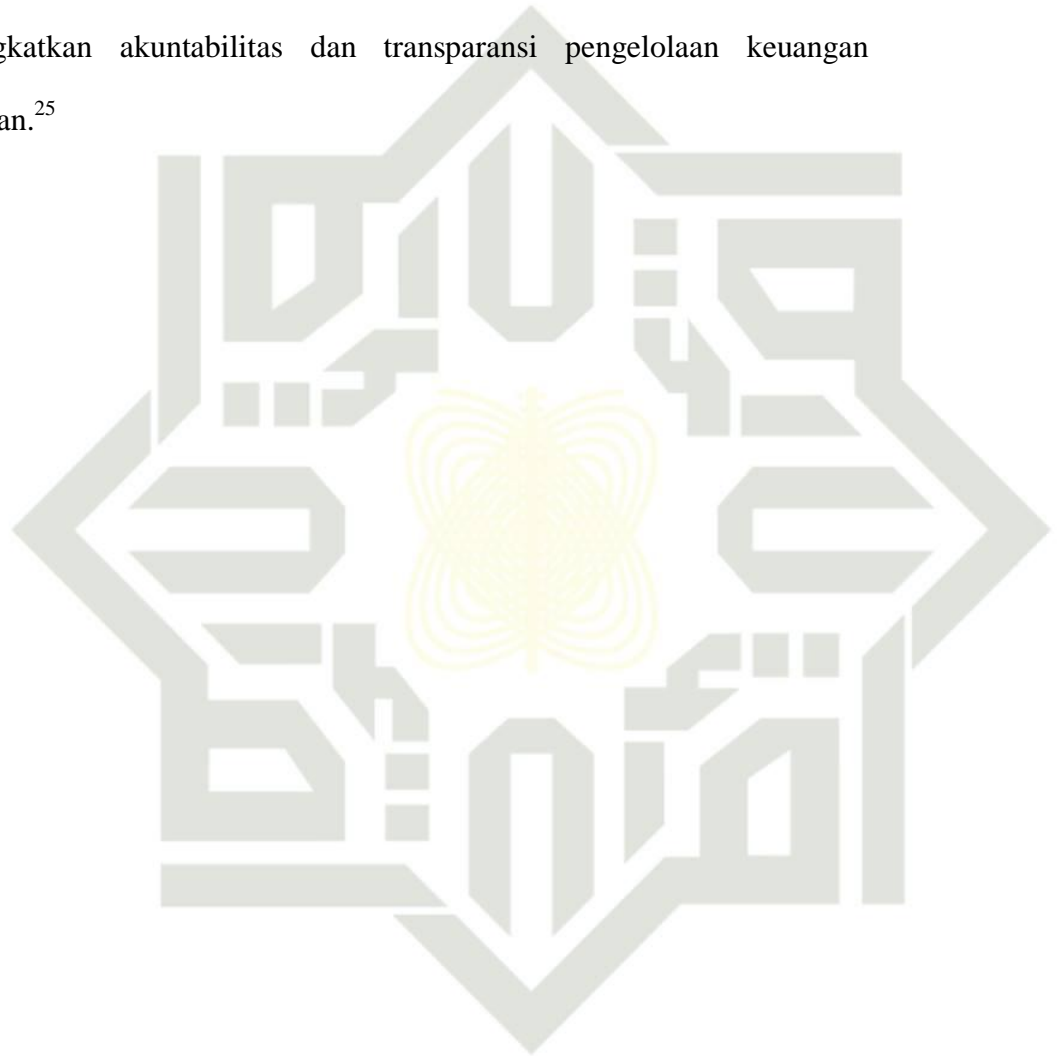
<sup>24</sup> <http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 16 september 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan pembinaan pengawasan aparatur peradilan yang berintegritas.
4. Meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui posbakum dan sidang keliling.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan peradilan.<sup>25</sup>



UIN SUSKA RIAU

<sup>25</sup> <http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 28 september 2019

### C. Struktur Organisasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- |                                                                 |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua                                                        | : Drs. Syarkasi, MH                                                                                                           |
| 2. Wakil Ketua                                                  | : Drs. H. Ribat, SH., MH                                                                                                      |
| 3. Majelis Hakim                                                | : a. Dra. Hj. Roznah Zaleha, MH<br>b. Dra. Murawati, MA<br>c. Drs. H. Nur Al Jum'at, SH., MH<br>d. Dra. Mardiah Harianjah, MH |
| 4. Panitera                                                     | : Lukman S.Ag., MH                                                                                                            |
| 5. Sekretaris                                                   | : H. Mustaming, S.Sos                                                                                                         |
| 6. Bendahara                                                    | : Hema Malini, SE                                                                                                             |
| 7. Panitera Muda Hukum                                          | : Misbar, S.Ag                                                                                                                |
| 8. Panitera Muda Gugatan                                        | : -                                                                                                                           |
| 9. Panitera Muda Permohonan                                     | : Hertina, BA                                                                                                                 |
| 10. Panitera Muda Pengganti                                     | : a. Elpitria, S.HI., MH<br>b. Jefa Efrianti, S.HI., MH<br>c. Ahmad Zaki Rusmani, S.HI                                        |
| 11. Kasubag, Perencanaan, Teknologi,<br>Informasi dan Pelaporan | : Maini Asniar, S.HI                                                                                                          |
| 12. Kasubag, Kepegawaian, Organisasi,<br>dan Tata Laksana       | : Junprizal, S.Ag                                                                                                             |
| 13. Kasubag, Umum dan Keuangan                                  | : Mailisa, SE                                                                                                                 |
| 14. Jurusita                                                    | : Mahput, S.HI                                                                                                                |
| 15. Jurusita Pengganti                                          | : a. H. Zulfiqri, S.HI<br>b. Hema Malini, SE                                                                                  |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rengat

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rengat meliputi 14 Kecamatan.

Jumlah Kecamatan/Kelurahan/Desa yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat adalah 14 Kecamatan dengan 13 Kelurahan dan 181 Desa.

Adapun daftar Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu :

- Kecamatan Rengat Barat
- Kecamatan Rengat
- Kecamatan Kuala Cenaku
- Kecamatan Seberida
- Kecamatan Batang Cenaku
- Kecamatan Batang Gansal
- Kecamatan Lirik
- Kecamatan Pasir Penyau
- Kecamatan Sungai Lala
- Kecamatan Lubuk Batu Jaya
- Kecamatan Kelayang
- Kecamatan Rakit Kulim
- Kecamatan Peranap
- Kecamatan Batang Peranap

## Uraian Tugas Pokok Pengadilan Agama

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadili berdasarkan hukum materil. Adapun kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 menyebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>26</sup>

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama bertempat di kota atau di ibu kota kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.<sup>27</sup>

#### G. Uraian Tugas Di Pengadilan Agama

1. Ketua
  - a. Mengatur pembagian tugas para hakim.
  - b. Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
  - c. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

<sup>26</sup> *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Tahun 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Cet. Ke-3, hlm. 62

<sup>27</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 9-11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya.
- f. Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah lau haim, panitera, sekretaris dan jurusita.<sup>28</sup>

### 2. Wakil Ketua

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/penetapan hakim dan putusan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian dalam tim dll.

### 3. Hakim

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu pencari keadilan ( pasal 5 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970).
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU No 14 tahun 1970).
- c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg).
- d. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970).

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet. Ke-9, hlm. 21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970).
- f. Meminutir berkas perkara (pasal 184 ayat (3), 186 ayat (2) HIR).
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU No. 14 tahun 1970).
- h. Membuat pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970).
- i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970).
- j. Mengawasi penasehat hukum.<sup>29</sup>

#### 4. Sekretaris

Koordinasi pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan.

Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan yang meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

#### 5. Panitera

- a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan
  - Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera muda, panitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
  - Memberikan putusan verstek dan putusan di luar hadir.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 29-30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitaan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama.
  - Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- b. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan
- Memantau dan mengawasi penerimaan, pendapatan nasional bukan pajak (PNBP), pembayaran gaji agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar.
  - Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
6. Wakil Panitera
- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
  - b. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan priodik dan lain-lain.
  - c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
  - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Panitera Muda Hukum

- a. Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan lain-lain sebagainya serta melaporkannya pada pimpinan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

8. Panitera Muda Gugatan

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan gugatan.
- d. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak berperkara apabila dimintanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyiaakan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- g. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.<sup>31</sup>

Dalam hal ini panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Rengat tidak ada sejak Kamariah S. Ag dimutasi ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan oktober tahun 2018, dan belum ada yang mengisi jabatan panitera muda gugatan hingga saat ini. Sehingga yang melaksanakan tugas panitera muda gugatan adalah panitera muda permohonan yaitu Hertina, BA.

#### 9. Panitera Muda Permohonan

- a. Melaksanakan tugas seperti Panitera Muda Gugatan dalam bidang perkara permohonan.
- b. Termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi Akta Ahli Waris di bawah tangan dan lain-lain.

#### 10. Panitera Pengganti

- a. Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti.
- b. Membantu hakim dalam hal:
  - Membuat penetapan hari sidang,
  - Membuat penetapan sita jaminan,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya,
- Membuat penetapan-penetapan lainnya.
- Mengetik putusan/penetapan sidang.

c. Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan/ (d.h.i: Petugas Meja Kedua) untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:

- Penundaan sidang serta alasan-alasannya,
- Amar putusan sela (kalau ada),
- Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada Kasir untuk diselesaikan tentang:
- Biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan /Permohonan (d.h.i: Petugas Meja Ketiga) apabila telah selesai dimutasi.<sup>32</sup>

#### 11. Kasubag Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
- b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Rengat dll.

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kasubag Umum

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang umum.
- b. Melaksanakan tata perusahaan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub umum.
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor.

13. Kasubag Keuangan

- a. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan.
- b. Membuat perencanaan anggaran Pengadilan Agama Rengat.
- c. Memonitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, unsur gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas dll.

Pada setiap Kepaniteraan Gugatan dan Kepaniteraan Permohonan terdapat sekelompok unit kerja yang menurut Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Peradilan (Pola Bindalmin) diberi nama Meja Pertama dan Kasir, Meja Kedua dan Meja Ketiga.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 26



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISPENSASI NIKAH

#### A Dispensasi Nikah

##### A. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah secara sederhana dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, menurut kamus besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Nikah adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>34</sup>

Sedangkan pengertian dispensasi menurut kamus hukum, makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>35</sup> W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia dispensasi adalah pembebasan dari suatu larangan.<sup>36</sup> Jadi dispensasi nikah adalah pembebasan larangan menikah/membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dispensasi nikah adalah untuk perkawinan

<sup>34</sup> <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada tanggal 7 oktober 2019

<sup>35</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992) hlm. 102

<sup>36</sup> W.J.S Poerwadarminta, diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, hlm. 124

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang calon mempelai laki-laki dan mempelai wanitanya belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun. Pengecualan tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal khusus. Seperti dalam kasus ini calon mempelai laki-laki atau perempuan belum mencukupi batas usia perkawinan setelah adanya permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi, kemudian adanya pertimbangan Hakim sehingga memutuskan membolehkan para calon mempelai untuk menikah.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, luntarnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.<sup>37</sup>

Banyaknya pasangan yang melaukan hubungan di luar nikah dan telah hamil sehingga harus menikah, sehingga tak sedikit yang putus sekolah. Usia minimal yang di perbolehkan menurut pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai umur 16 tahun. Dalam kompilasi hukum islam, dalam pasal 15 juga memuat aturan yang di dalam KHI justru disebutkan alasan pembatasan usia minimal kawin, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

<sup>37</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20, No. 2, 2013, hlm. 302

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang yaitu, sebisa mungkin jangan nikah di bawah umur 19 tahun dan 16 tahun karena ini adalah batas terendah, menikah dengan usia yang lebih tinggi akan jauh lebih baik. Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan yang mengatur kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53.

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan melangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.<sup>38</sup>

Orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua atau walinya.<sup>39</sup>

#### B. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita yang belum berumur 16 tahun. (UU No.1/1974 Pasal 7 ayat (1)) Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis

<sup>38</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), hlm. 125

<sup>39</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, 2013, hlm. 148



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan UU itu, dalam Permenag No.3 Tahun 1975 ditentukan: Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. (permenag No.3/1975 pasal 1(2) sub g). Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama : (permenag No.3/1975 pasal 13(1).

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya : (permenag No.3/1975 pasal 13 ayat (2)). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan : (permenag No.3/1975 pasal 13 ayat (3)). Dalam hal ini permohonan dispensasi nikah ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu sendiri yang mengajukan seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 21 tahun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua surat permohonan tidak perlu mendapat izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari instansi manapun. Pemohon langsung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.<sup>40</sup>

Adapun pemohon umpamanya memerlukan berkonsultasi dengan advokat atau Badan Penasehat Perkawinan Penyelesaian Perceraian (BP4) dan lain sebagainya, baik sebelum perkaranya terdaftar di pengadilan ataupun sesudahnya, itupun hak pribadinya, bukan keharusan, dan bukan pula merupakan syarat suatu permohonan.<sup>41</sup>

Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat sebagai berikut: Meskipun surat permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan ke Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus hanya berlaku bagi (anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil).

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat didaftarkan suatu perkara di Pengadilan yaitu: Surat permohonan tertulis, surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi pemohon, voorschot (uang muka) biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

<sup>40</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 57

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut prinsip hukum acara perdata, apabila tiga hal tersebut sudah terpenuhi, Pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkara, sebab syarat-syarat kelengkapan lainnya sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.<sup>42</sup>

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah yang paling utama adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) asli surat model N9, bahwa calon mempelai laki-laki belum mencapai usia 19 tahun atau calon mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun. Dalam hal ini yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali, adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah fotocopy kutipan akta nikah/duplikatnya sebanyak 1 lembar, fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 lembar, fotocopy ijazah anak pemohon sebanyak 1 lembar, masing-masing fotocopy diberi materai Rp. 6000,- dan dilegalisasi (lagis) di Kantor Pos.

Prosedur pendaftaran dispensasi nikah :

- 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan.
- 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat permohonan minimal 2 (dua) rangkap.
- 3) Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 69



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Biaya panjar perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 4) Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.
- 5) Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- 6) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- 7) Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan dalam surat permohonan.<sup>43</sup>
- 8) Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

<sup>43</sup> <http://pa-rengat.go.id/new/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/biaya.html> diakses pada tanggal 16 September 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pihak berperkara datang ke loket pembayaran bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- 10) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi drai petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- 11) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali pada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan.
- 12) Pihak berperkara menyerahkan kepada Meja Kedua menyerahkan kepada Meja dua surat permohonan ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan surat keterangan untuk membayar (SKUM).
- 13) Petugas Meja dua mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Petugas Meja dua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register pada surat berperkar.<sup>44</sup>

Setelah pendafratan selesai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” majelis hakim (Pasal 121 HIR jo pasal 93 UU-PA). Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, PMH dibuat dalam bentuk “Penetapan” dan ditandatangani oleh Ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

Untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seseorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera (pasal 11 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Penunjukan panitera sidang dilaukan oleh panitera Pengadilan Agama (pasal 96 UU Peradilan Agama No. 50 tahun 2009). Penunjukkan PPS dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama.

Ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua majelis hakim kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan (pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetapan” yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis.<sup>45</sup>

#### Pihak Yang Boleh Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam perkara dispensasi nikah adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi maksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun dalam pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

<sup>45</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta\_ Pustaka Pelajar, 2017), Cet. Ke-9, hlm. 61-62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua pihak pria atau pihak wanita yang berhak mengajukan dispensasi nikah ini adalah sesuai dengan yang di maksud Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud pasal 6 ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.<sup>46</sup>

Permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh calon mempelai pria/calon mempelai wanita dapat dilakukan bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria / calon mempelai wanita bertempat tinggal.<sup>47</sup>

Adapun di Pengadilan Agama Rengat banyak orang tua atau wali yang mengajukan permohonan dispensasi nikah bukan saja dengan alasan belum mencapai batas usia perkawinan, melainkan banyak juga yang menggunakan alasan telah melakukan hubungan di luar nikah, telah hamil, sudah tidak dapat di pisahkan lagi, dan sudah berpacaran lama sehingga membuat pemohon atau orang tua malu karena anaknya terkena jam malam.

<sup>46</sup> Undang-undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, (Surabaya : Permata Press, 2015), hlm. 4-5

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, 2013, hlm. 148

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di pengadilan agama rangat tahun 2017-2018 dapat disimpulkan bahwa :

1. Implikasi terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah tentunya apabila dikabulkan maka mereka mendapatkan penetapan dari permohonan dispensai nikah yang telah dimohonkan, sehingga dapat melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinannya sah karena dispensasi nikah dikabulkan. Tetapi tak jarang ada yang baru menikah kemudian mengajukan gugatan cerai karena mereka belum mampu menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat yaitu pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah, tingkat pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan agama sehingga banyaknya anak-anak yang berpacaran terkadang hingga melakukan hal-hal yang tak diinginkan kalau mereka tahu agama mereka tidak akan melaukannya. Dan yang terakhir yaitu kekhawatiran orang tua karena anaknya berpacaran dan sering besama orang tua takut anaknya terjerumus dalam kemaksiatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah hakim selain mempertimbangkan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku hakim juga mempertimbangkan menggunakan hadist dan kaidah-kaidah hukum:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh memudhartakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

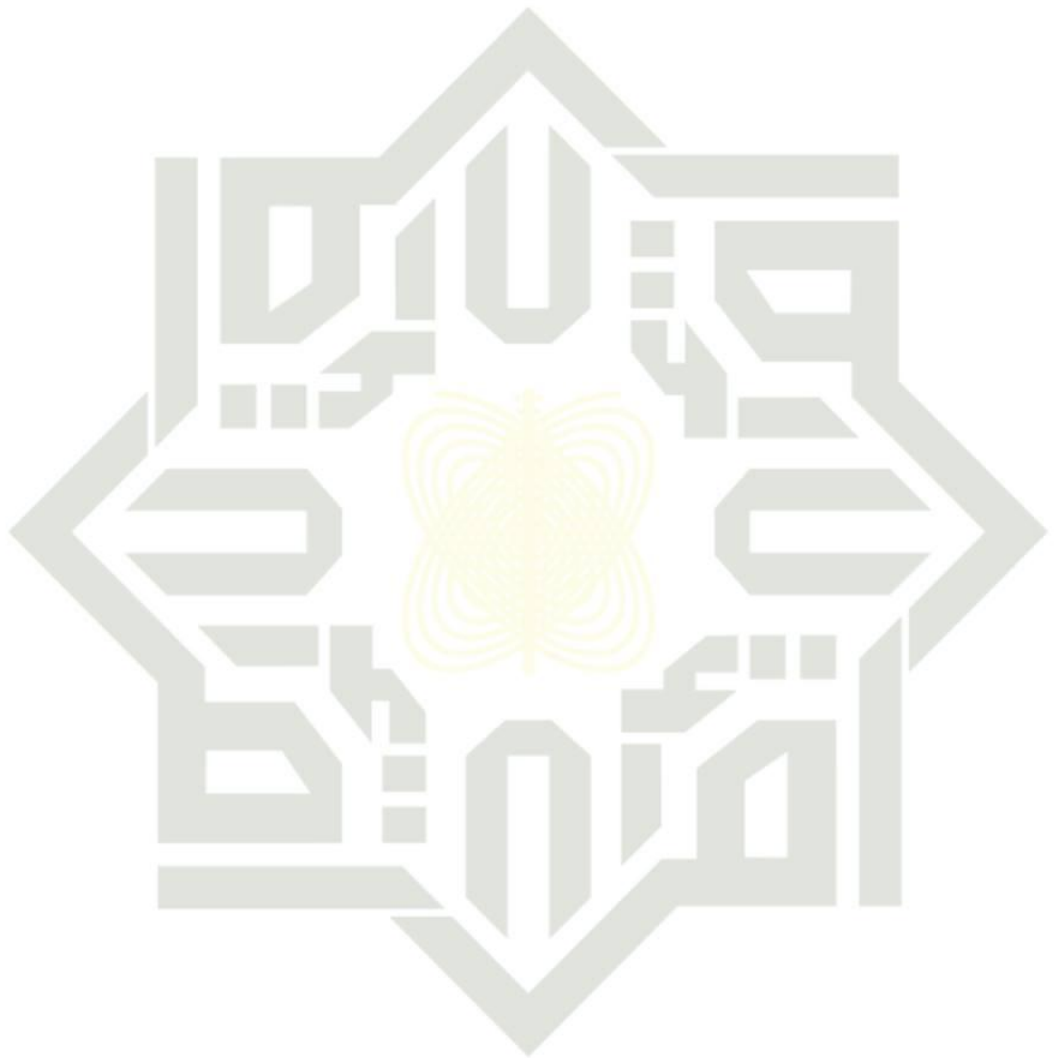
دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: “mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”.

#### B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Rengat Majelis Hakim harus lebih cermat dan diperketat sebelum memberi dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, karena perceraian akibat perkawinan yang mempelainya masih di bawah umur semakin meningkat.
2. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian sebisa mungkin memberikan pendidikan baik pelajaran agama maupun pelajaran umum. Sehingga anak-anak dapat terhindar dari pernikahan di bawah umur.
3. Kepada pembaca agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan bacaan untuk perkembangan ilmu dan sebagai pengetahuan.

4. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat mengadakan penyuluhan bagi remaja tentang hal ini agar tidak semakin banyak pergaulan bebas dan permohonan dispensasi nikah.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Dar al Kitab al ‘ilmiyyah. Juz V.
- Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, Cet. Ke-4.
- A. Djazuli, 2010, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta.
- Abdur Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, Cet. Ke-4.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, Cet. Ke-1.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Tahun 2009)*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta Cet. Ke-3.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Cet. Ke-3.
- Bagya Agung Prabowo, 2013, *Pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensai*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. Ke-14.
- Bambang Sutiyo, Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Dedi Supriyadi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Forum Sosiologi Kontemporer, *Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya*, <http://sosiologi.com/objek-penelitian> diakses pada 15 Juli 2019.
- Elman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Cet. Ke-1.
- Ibnu Majah Abu Abdillah bin Muhammad bin Yazid al-qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, (al-Halabi: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), Juz 2.
- [http://id.wikipedia.org/Dispensasi Pernikahan](http://id.wikipedia.org/Dispensasi_Pernikahan) diakses pada tanggal 15 Juli 2019.
- <https://kbbi.web.id/dispensai> diakses pada tanggal 7 oktober 2019
- <http://pa-rengat.go.id/new/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/biaya.html> diakses pada tanggal 16 September 2019.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 16 september 2019.

<http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 16 september 2019.

<http://rahmayanisembiring.bogspot.com/2012/12/subjek-penelitian.html> diakses pada 15 Juli 2019.

Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih*, PT SIGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta.

Muhammad Kunradi, HM Mawardi Muzamil, 2014, *Implikasi Dinpensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1.

Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. Ke-9.

Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-16.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Thami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta. Cet. Ke-4.

Undang-undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, 2015, Permata Press, Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2009, New Merah Putih, Yogyakarta, Cet. Ke-1.

J.S Poerwadarminta, diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Ke-17.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PANDUAN WAWANCARA**

1. Bagaimana impikasi terhadap penetapan dispensasi nikah ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi nikah ?
3. Apa dasar hukum diberlakukannya dispensasi nikah ?
4. Pertimbangan hukum apakah yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam menetapkan dispensasi nikah ?
5. Mengapa alasan hamil diluar nikah diperbolehkan atau diberikan dispensasi nikah ?
6. Bagaimana dampak setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ?
7. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah ?
8. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi nikah ?
9. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah ?
10. Bagaimanakah cara mengurangi agar tidak terjadi banyaknya permohonan dispensasi nikah ?

Mengetahui Dosen Pembimbing

**Dra. Hj. Yusliati, MA**  
**NIP. 19580707 198612 2 001**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6383/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,08 Agustus 2019

Kepada  
Yth.Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas IB

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : APRILIANA SARI  
NIM : 11521201360  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Pengadilan Agama Rengat Kelas IB

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Undang-Undang

Sulawesi Islamic University of Suka m Riau

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25155  
TENTANG



032010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6383/2019 Tanggal 8 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |                                                                                                           |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | APRILIANA SARI                                                                                            |
| 2. NIM / KTP         | : | 11521201360                                                                                               |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)                                                                         |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                        |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                 |
| 6. Judul Penelitian  | : | TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IB                                                                          |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609  
Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [www.dpmptsp.inhukab.go.id](http://www.dpmptsp.inhukab.go.id)

# RENGAT

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 178/DPMPTSP/NON IZIN-PENELITIAN/VIII/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat keterangan penelitian
2. Permohonan Yang bersangkutan
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor **503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/25155 Tanggal 08 Agustus 2019**
- Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama : **APRILIANA SARI**
2. NIM : **11521201360**
3. Jenjang : **S1**
4. Alamat : **Dsn. Bumi Asih Desa Buluh Rampai Kec. Seberida**
- Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Penelitian : **TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018**
- b. Tujuan Penelitian : **UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018**
- c. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B**
- d. Waktu Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
- e. Bidang Penelitian : **HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)**
- f. Status Penelitian : **PERSEORANGAN**
- g. Penanggung Jawab / Koordinator / Anggota Peneliti : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
- i. Nama lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
- Melaksanakan kegiatan dimaksud
- tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
- Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.
- Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



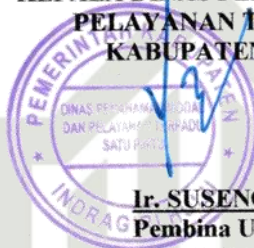
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- e. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**Ir. SUSENO ADJL. MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19601213 198903 1 005**

**Tembusan Disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.
2. UIN Suska Riau – Pekanbaru
3. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B

JL. Batu Canai Nomor. 17 TELP/FAX (0769) 341102

Website : [www.pa-rengat.go.id](http://www.pa-rengat.go.id) Email : [parengat@yahoo.com](mailto:parengat@yahoo.com)

PEMATANG REBA- RENGAT 29351

### SURAT KETERANGAN

W4-A2/1314 /HK.05/ IX /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Rengat menerangkan bahwa:

Nama : Apriliana Sari  
NIM : 11521201360  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Adalah mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian (Reseach) di Pengadilan Agama Rengat, guna untuk penulisan skripsi dengan Judul : TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rengat 06 September 2019

Wakil Ketua,



Drs. H. Ribat, S.H., M.H  
NIP. 196810281994031010



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : APRILIANA SARI

NIM : 11521201360

Program Studi: HUKUM KELUARGA

Judul : *Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018*

Pembimbing : Dr. Hj. Yusliati, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 April 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Apriliana Sari**, dilahirkan di Titian Resak, pada tanggal 20 April 1998, dari pasangan Ayahanda Suprpto dengan Ibunda Yunidar, anak pertama dari 3 (Tiga) bersaudara. Adapun saudara-saudara penulis adalah Nurlaili Syafitri dan Zul Fahmi Eka Saputra.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: Tamat pendidikan taman kanak-kanak/raudatul atfal Al-Ihsan tahun 2003. Tamat sekolah dasar pada SDN 006 Buluh Rampai tahun 2009. Tamat pendidikan sekolah menengah di Madrasah Tsanawiyah Al-ihsan Buluh Rampai pada tahun 2012. Tamat pendidikan sekolah menengah atas Madrasah Aliyah Swasta di Pondok Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an Langsa tahun 2015. Kemudian tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah/AH) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Magang) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 01 Februari s/d 31 Maret 2018, dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat (KKN) pada Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 16 Juli s/d 31 Agustus 2018. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rengat dengan judul: **Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018**. Alhamdulillah pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 berdasarkan hasil ujian Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan "LULUS" dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*